SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PEDOFILIA OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (STUDI DI KOTA PAYAKUMBUH)

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

FARHAN GHAZALI
1910113060

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)

Pembimbing :

Efren Nova, S.H., M.H
Dr. Edita Elda, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

No.Reg : 01/PK-IV/IV/2025

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PEDOFILIA OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

(STUDI DI KOTA PAYAKUMBUH)

(Farhan Ghazali, 1910113060, 91 halaman, Hukum Pidana, Fakultas HukumUniversitas Andalas, 2025)

ABSTRAK

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ditetapkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Melindungi anak menjadi suatu kewajiban agar mereka tidak menjadi korban tindakan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam upaya perlindungan terhadap anak korban pedofilia pemerintah membentuk suatu lembaga yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Adapun rumusan masalah yang penulis angkat yaitu, (1)Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia di P2TP2A Kota Payakumbuh? (2)Apa saja kendala yang dihadapi P2TP2A kota Payakumbuh dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia? (3)Bagaimana upaya P2TP2A kota Payakumbuh dalam mengatasi kendala perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia? Metode kepenulisan yang digunakan penulis adalah yuridis empiris. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pedofilia, P2TP2A Luhak Nan Bungsu Payakumbuh sudah melakukan tugas dan fungsinya sebaik mungkin, Pelayanan sosial yang diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberi rasa aman terhadap korban, memberi informasi tentang hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan. Kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pedofilia oleh P2TP2A Luhak Nan Bungsu yaitu karena belum adanya Rumah Aman bagi Korban tindak kekerasan seksual terhadap anak, serta kurangnya kesadaran hukum korban dan masyarakat yang menjadi saksi untuk menerapkan delik aduan sehingga pelaku tidak dapat dituntut atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Upaya yang dilakukan oleh P2TP2A Luhak Nan Bungsu Payakumbuh dalam mengatasi kendala yang dihadapi yaitu dengan cara menitipkan anak korban pedofilia ke rumah warga atau rumah RT maupun RW agar setiap korban kekerasan seksual terhadap anak mendapatkan kenyamanan, perlindungan serta terpantau oleh P2TP2A Luhak Nan Bungsu Payakumbuh, dan mengadakan penyuluhan atau sosialisasi agar masyarakat setempat tau dan sadar hukum baik bagi korban tindak kekerasan seksual terhadap anak, masyarakat yang menjadi saksi tindak kekerasan seksual terhadap anak maupun pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pedofilia, Anak Korban Pedofilia, P2TP2A.